

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



BPBD GRESIK

PUSDALOPS

BPBD Gresik
19-10-2021
10:41:11
Rm: 21-316

PROFIL

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gresik**

2023



BPBD Kabupaten Gresik

Jl. Dr. Wahidin SH. No. 133 Gresik

Telp. (031) 395151

Website : bpbd.gresikkab.go.id



PROFIL BPBD 2023

 **bangga**
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan,
Tetap Semangat, Siap Untuk Selamat.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sebuah kebanggaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat menyusun Buku Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagai unsur pelaksana di bidang Penanggulangan Bencana. buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mulai tugas dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, program dan kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Gresik sekaligus melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan di bidang kebencanaan di kabupaten Gresik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku profil ini. Harapan kami, semoga Buku Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, khususnya dalam upaya mewujudkan good governance sekaligus dapat dijadikan landasan kebijakan penanggulangan bencana pada masa yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Drs. DARMAWAN, M.Si
19670803 198809 1 003



MARS TANGGUH BENCANA

Cipt. Dr.Syamsul Maarif,MSi

...

Semangat Berjuang
Demi Panggilan Kemanusiaan
Gerak Terpadu
Pemerintahnya, Masyarakat,
dan Dunia Usaha

Demi Negara
Wujudkan Cita
M'nuju Ketangguhan Bangsa
Menghadapi Bencana

Semangat Berjuang
Demi Panggilan Kemanusiaan
Gerak Terpadu
Pemerintahnya, Masyarakat,
dan Dunia Usaha

Demi Negara
Wujudkan Cita
M'nuju Ketangguhan Bangsa
Menghadapi Bencana
M'nuju Ketangguhan Bangsa
Menghadapi Bencana

=====
BPBD KABUPATEN GRESIK
=====

****SALAM TANGGUH****

****SALAM KEMANUSIAAN****

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Secara administratif Kabupaten Gresik memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara	Laut Jawa
Timur	Selat Madura dan Kota Surabaya
Selatan	Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
Barat	Kabupaten Lamongan

Dari segi topografi, Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 2-12 mpl dan panjang pantai lebih kurang 140 km², kecuali Kecamatan Penceng yang berada pada ketinggian 25 mdpl. Dalam rentang waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2021, Kabupaten Gresik telah beberap kali mengalami bencana banjir, luapan Sungai Kali Lamong dan Sungai Bengawan Solo. Disamping bencana banjir Kabupaten Gresik mempunyai kerawanan terhadap bencana angin puting beliung, longsor, kekeringan, abrasi, gelombang pasang, kebakaran lahan dan hutan, serta gempa bumi. Sektor industri terutamanya industri pengolahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu sektor unggulan dan strategis. 12.112,59 ha (10,16%) luas Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Kawasan Industri akan terus dikembangkan terutama di Kecamatan Ujungpangkah, Manyar, dan Kecamatan Sidayu dengan luas ±1.000 – 4.000 ha. Kegagalan teknologi pada kawasan industri merupakan ancaman bencana yang harus diantisipasi oleh Kabupaten Gresik.

LATAR BELAKANG

Kondisi wilayah Kabupaten Gresik memiliki potensi terjadinya bencana, seperti banjir, kegagalan teknologi, angin ribut/ puting beliung, kekeringan, tanah longsor, dan peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdapat amanat untuk membentuk suatu organisasi perangkat daerah yang menangani bidang kebencanaan. guna melindungi segenap masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gresik.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka pengurangan risiko akibat bencana dapat ditekan serendah mungkin.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat saja, tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga Pemerintah Daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Belum maksimalnya koordinasi yang efektif, baik antar unit/institusi vertical Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dan koordinasi antar stakeholder lainnya seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan masyarakat. Minimnya kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembekalan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Pentingnya pemenuhan peraturan di daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, membenahan struktur dan jalur birokrasi dalam pemberian bantuan bencana; masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tetap bagi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah, yang selanjutnya diatur tugas pokok, fungsinya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.



PROFIL BPBD 2023

bangga
melayani
bangsa

PROFIL BPBD KAB. GRESIK

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur, karena letak geografis, geologis dan demografis. Secara geografis Kabupaten Gresik terletak di Sebelah Barat laut dan ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dan memiliki luas 1,191,25 Kilometer Persegi dengan Panjang pantai \pm 140 Kilometer Persegi. Kajian Risiko Bencana di suatu daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU. PB 24/2007).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 47 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai kawasan yang aman dan nyaman dari bencana dengan melaksanakan pencegahan pengendalian dan penanggulangan bencana secara cepat tepat dan akurat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gresik yang aman dan sejahtera hal tersebut sesuai dengan visi Kabupaten Gresik.



STRUKTUR ORGANISASI



**KEPALA BADAN
SEKDA (EX. OFFICIO)**



**KEPALA PELAKSANA
BPBD**



**SEKRETARIS
BPBD
Maisyaroh, S.Sos., MM.**



**KEPALA BIDANG
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan**

Ir. Rachmat Haryadi, MM.



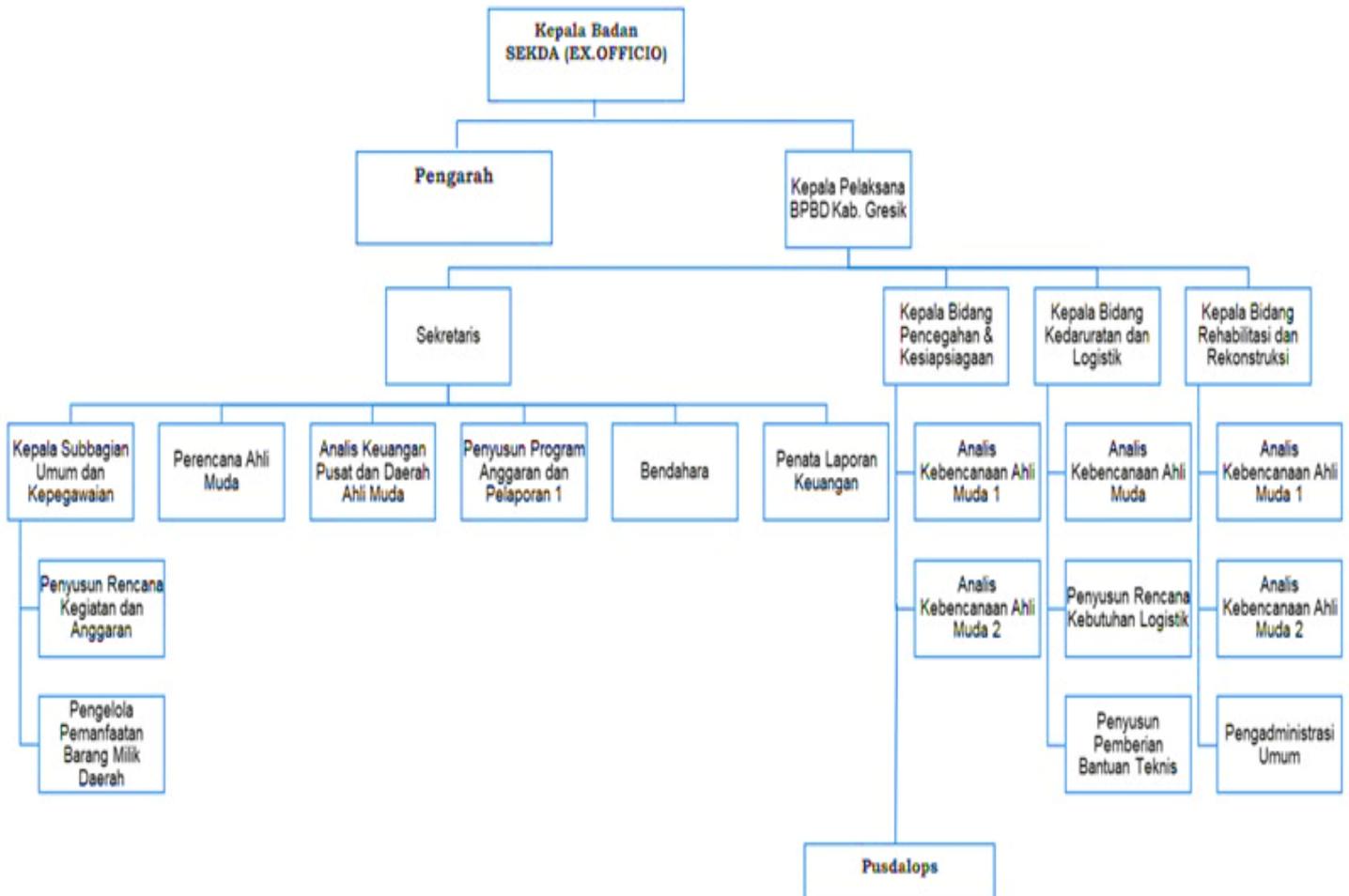
**KEPALA BIDANG
Kedaruratan dan
Logistik**

F.X. Driatmiko Herlambang, S.Sos.



**KEPALA BIDANG
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi**

Minhad, SE., MM.



VISI BPBD

Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Crepat. Tepat, Tangguh dan Menyeluruh

MISI BPBD

- Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menunjang pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana
- Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana
- Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

MISI DAN MISI KABUPATEN GRESIK 2021 - 2026

VISI

“ MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERDASARKAN AKHLAKUL KARIMAH ”

MISI

1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.
2. Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan social dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat Gresik

Tugas

BPBD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pendistribusian logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara efisien, efektif dan akuntabel.

Fungsi

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gresik
- f. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD

PRINSIP

- a. Cepat dan tepat
- b. prioritas
- c. Koordinasi dan keterpaduan
- d. Berdaya guna dan berhasil guna
- e. Transparansi dan akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Non diskriminatif
- i. Non Proletisi

TUJUAN

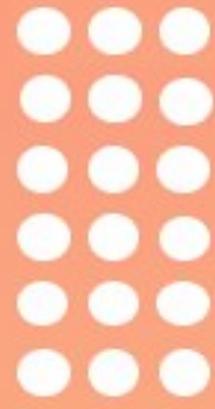
- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- c. Menghargai budaya dan kearifan local
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, bernegara

TANGGUNG JAWAB

- a. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk prabencana, saat bencana, dan pasca bencana
- b. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah
- c. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- d. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan

WEWENANG

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau dengan Pemerintah Daerah lain
- d. Pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam
- f. Pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan



PROFIL BPBD 2023

bangga
melayani
bangsa

BPBD GRESIK



TUGAS POKOK FUNGSI



Tugas Pokok Fungsi

● Kepala Badan

Kepala Badan bertugas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program dan aktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik.



● Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

● Unsur Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

A circular graphic with a gradient from orange to yellow, containing the word 'FUNGSI' in white capital letters.

FUNGSI

● **Unsur Pengarah**

- a. pengarahan dalam penyelarasan, perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian dan analisis pemetaan daerah rawan bencana;
- c. pengarahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- d. pengarahan dalam pelaksanaan konsolidasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- e. pengarahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menghimpun bantuan bencana; f. pengarahan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan



SUMBER DAYA BPBD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kabupaten Gresik memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia dan Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :



SDM BPBD

Berdasarkan Status Kepegawaian

- PNS (20 Org)
- Non PNS (27 Org)

Berdasarkan Pendidikan Terakhir

- SMA / Sederajat (20 Org)
- D3 (3 Org)
- S1 (19 Org)
- S2 (5 Org)

Berdasarkan Jabatan / Bidang

- Kepala Pelaksana BPBD (1 Org)
- Sekretariat (22 Org)
- Bidang PK (6 Org)
- Bidang KL (7 Org)
- Bidang RR (6 Org)
- Pusdalops (5 Org)



SARPRAS UMUM

- Gedung Kantor BPBD (1 Unit)
- Gedung Pusdalops (1 Unit)
- Gudang Logistik (1 Unit)
- Ruang Rapat/Pertemuan (1 Buah)
- Musholla (1 Buah)
- Kamar Mandi/Toilet (3 Buah)



Peralatan Logistik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Mobil Rescue Ranger	1 Unit	Baik
2	Mobil Rescue Anti Banjir	1 Unit	Baik
3	Mobil Navara	1 Unit	Baik
4	Mobil Inova	1 Unit	Baik
5	Mobil Expander	3 Unit	Baik
6	Mobil Terios	1 Unit	Baik
7	Mobil Avanza	1 Unit	Baik
8	Truk serbaguna	1 Unit	Baik
9	Mobil Tangki Air	5 Unit	Baik
10	Mobil Pick up	2 Unit	Baik
11	Spd Motor Traill	9 Unit	Baik
12	Sepeda Motor Revo	1 Unit	Baik
13	Sepeda Motor matic	8 Unit	Baik
14	Trolley Perahu	2 Unit	RB
15	Handy Talky (HT) Analog	11 Unit	Baik



Peralatan Logistik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
16	RIG	8 Unit	Baik
17	GPS	2 Unit	Baik
18	Repiter / antena	2 Unit	Baik
19	Megaphone	2 Unit	Baik
20	Alat Pemotong Baja	1 Unit	RB
21	Rompi Pelampung	80 Unit	50 Baik, 30 RB
22	Ring Buoy /Pelampung	20 Unit	Baik
23	Perahu Karet 6 org	1 Unit	Baik
24	Perahu Karet 8 org	4 Unit	Baik
25	Perahu Karet 10 org	1 Unit	Baik
26	Speedboat	1 Unit	RB
27	Perahu Polythene	1 Unit	Baik
28	Perahu refting	4 Unit	3 Baik, 1 RB
29	Perahu Evakuasi	8 Unit	Baik
30	Handy Talky (HT) Analog	3 Unit	Baik
31	Helm Petzl	7 Unit	Baik
32	Sepatu Karang	5 Pasang	Baik
33	Mesin Perahu 15 pk	4 Unit	2 Baik, 2 RB
34	Mesin Perahu 18 pk	1 Unit	RB
35	Mesin Perahu 40 pk	1 Unit	RB
36	Mesin Perahu 8 pk	1 Unit	RR
37	Dayung	8 Unit	Baik



Peralatan Logistik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
38	Teropong / Teleskop	1 Unit	BAIK
39	Chain Saw	8 10 Unit	6 BAIK, 2 RB
40	Apar Pemadam Kebakaran	4 Unit	4 RR
41	Alat selam	2 Unit	BAIK
42	Linggis	5 Unit	BAIK
43	Cangkul	5 Unit	BAIK
44	Sekop	10 Unit	BAIK
45	Kereta dorong	5 Unit	BAIK
46	Drone	1 Unit	BAIK
47	Tenda Keluarga	10 Unit	4 BAIK, 6 RB
48	Tenda Pengungsi	3 Unit	1 RB, 2 RR
49	Tenda Pleton	1 Unit	RB
50	Tenda Posko	1 Unit	RB
51	Tenda Regu	3 Unit	RB
52	Tandu	12 Unit	BAIK
53	Velbed	20 Unit	BAIK
54	Water Treatment Portable	1 Unit	RB
55	Water Treatmen mini	4 Unit	BAIK
56	Kompur Gas	4 Unit	RB
57	Elpigi 15 kg	4 Unit	BAIK
58	Mesin Penyedot Air	4 Unit	BAIK
59	Ban dalam Pelampung	20 Unit	BAIK



Peralatan Logistik

No	Nama Barang	Jumlah	Ket.
60	Senter	6 Unit	RB
62	Solar Sel Generator	2 Unit	BAIK
63	Solar Camping Lantern	13 Unit	10 BAIK, 3 RB
64	Genset 5 KVA	1 Unit	RR
65	Genset 650 Watt	3 Unit	RR
66	Lampu sorot	1 Unit	RB
67	Search Light	1 Unit	BAIK
68	Portable Led Light Tower Baselght 420 x	1 Unit	BAIK
69	EWS Banjir	2 Unit	BAIK
70	EWS pergerakan tanah	2 Unit	BAIK
71	Perahu Lipat Portable	2 Unit	BAIK
72	Motor Roda Tiga Penyemprotan	1 Unit	BAIK

Keterangan :

- RR : Rusak Ringan
- RB : Rusak Berat

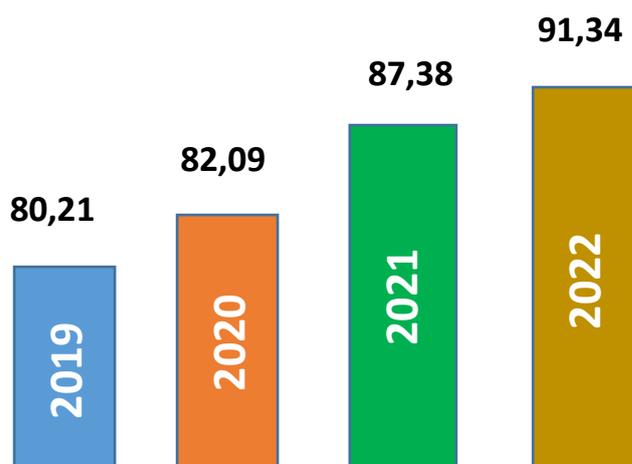


CAPAIAN KINERJA BPBD

Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan



● NILAI SAKIP





DAFTAR PENGHARGAAN BPBD



No.	Nama Penghargaan	Tahun
1.	Juara I Tingkat Nasional Bidang Penanganan Darurat	2015
2.	Terbaik Kategori Utama Bidang Partisipasi Masyarakat Lomba Desa Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur	2016
3.	Terbaik III Kategori Disiplin Waktu Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik	2017
4.	Terbaik 3 kategori Hemat Energi Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik	2017
5.	Terbaik Kategori Utama Bidang Partisipasi dan Pengembangan Kapasitas Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur	2017
6.	Terbaik Kategori Utama Bidang Kemandirian Pendanaan Lomba Desa Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur	2018
7.	Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur	2019
8.	Juara Harapan II Lomba PUSDALOPS Tingkat Provinsi Jawa Timur	2019
9.	Juara Harapan I Lomba Poster Hari Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur	2019



SEKERTARIAT



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan rumah tangga kantor.

Sekretaris

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumsan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan umum dan kepegawaian.

Fungsi

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya



SDM



**TERDIRI
ATAS**

- Sekretaris : 1 Orang
- Subbagian Umum dan Kepegawaian : 1 Orang
- Jabatan Fungsional : 2 Orang
- Tenaga Teknis : 11 Orang
- Tenaga Kebersihan : 2 Orang
- Tenaga Keamanan : 3 Orang



SARPRAS

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Meja Kerja dan Kursi Eselon III	1 Unit
2	Meja kerja dan Kursi Eselon IV / Fungsional	3 Unit
3	Meja dan Kursi Staf Administrasi	7 Unit
4	Mobil Dinas	1 Unit
5	Sepeda Motor Dinas	5 Unit
6	Kursi Tamu	4 Unit
7	Komputer PC	3 Unit
8	Laptop	7 Unit
9	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit
10	Printer	5 Unit

No	Sarana Prasarana	Jumlah
11	Brankas	1 Unit
12	Jam Dinding	1 Unit
13	Kotak P3K	1 Unit
14	Lemari	5 Unit
15	Kulkas	1 Unit
16	TV	1 Unit
17	Felling Kabinet	4 Unit
18	Telp/Fax	1 Unit

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana.

Kepala Bidang PK

Tugas

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana.

Fungsi

- a. penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- f. pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai bidang tugasnya.

**SDM****TERDIRI
ATAS**

- Kabid PK : 1 Orang
- Jabatan Fungsional : 2 Orang
- Tenaga Teknis : 4 Orang

**SARPRAS**

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Meja Kerja dan Kursi Eselon III	1 Unit
2	Meja kerja dan Kursi Eselon IV / Fungsional	2 Unit
3	Meja dan Kursi Staf Administrasi	3 Unit
4	Mobil Dinas	1 Unit
5	Sepeda Motor Dinas	3 Unit
6	Kursi Tamu	3 Unit
7	Komputer PC	2Unit
8	Laptop	3 Unit
9	Printer	3 Unit
10	Jam Dinding	1 Unit
11	Kotak P3K	1 Unit
12	Lemari	5 Unit
13	Kulkas	1 Unit
14	TV	1 Unit
15	Felling Kabinet	4 Unit
16	Dispenser	1 Unit
17	AC	2 Unit

PROGRAM KERJA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana



Satuan Pendidikan
Aman Bencana



Rambu Evakuasi
Bencana



Pelatihan Untuk
Peningkatan Kapasitas
SDM PB



Pelatihan Untuk
Peningkatan Kapasitas
TRC PB



Early Warning
System



Hari Kesiapsiagaan
Bencana



Penyusunan
Dokumen PB
(Renkon)



Kesiapsiagaan Posko
Bencana



PEMBENTUKAN DESTANA



Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Desa/Kelurahan tangguh bencana harus memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Sampai tahun 2022 terbentuk sebanyak 100 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Dari seluruh 356 Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik atau sebesar 28 % telah terbentuk desa tangguh bencana (Destana)

Bidang Kedaruratan dan Logistik



Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat, menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada lokasi kejadian bencana.

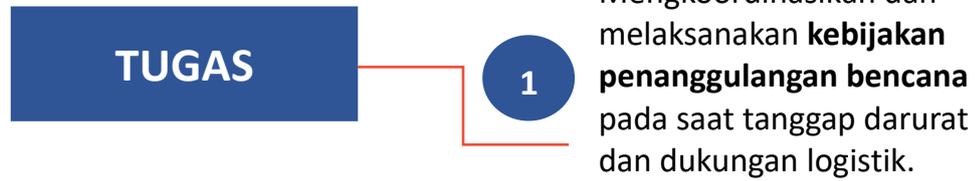
Kepala Bidang KL

Tugas

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik

Fungsi

- a. penyusunan usulan rencana program dan kegiatan kedaruratan dan logistik;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik bantuan bencana;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
- d. penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
- f. pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- h. pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sesuai bidang tugasnya



PROGRAM KERJA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

**Respon Cepat
Penanganan
Darurat Bencana**



**Rapat Koordinasi Penanganan
Darurat Bencana**

**Penyediaan
Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban**



**Penyediaan Matrial Bahan Bangunan
dan Paket Sembako korban Bencana.
Dropping Air Bersih untuk Kekeringan**

**Aktivasi Sistem
Komando
Penanganan
Darurat Bencana**



Relawan BPBD Penanganan Bencana



BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

BIDANG RR



Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana sosial dasar yang mengalami kerusakan akibat korban bencana.

Kepala Bidang RR

Tugas

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana

Fungsi

- a. penyusunan usulan dalam bentuk rumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan mobilisasi rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- e. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

PROGRAM KERJA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



Bimbingan Teknis
JITUPASNA



Kerjasama antar
Lembaga dan
Kemitraan PB



Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan PB



Penyusunan Regulasi
Penanggulangan
Bencana

POTENSI BENCANA



Jl. Dr. Wandin SH. No. 133 Gresik
Telp. (031) 395351
Website : bpbd.gresik.kab.go.id



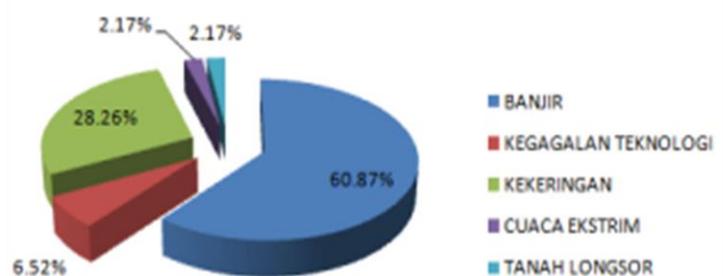
Potensi Bencana di Kabupaten Gresik

Karakteristik wilayah yang cukup kompleks Kabupaten Gresik, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis berdampak pada terdapatnya potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana sosial, seperti Ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Ancaman bencana di Kabupaten Gresik tersebar secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang diteliti oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya, menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik. Penjabaran keseluruhan hasil tersebut dikaji dalam bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Gresik untuk masa dari tahun 2021 sampai 2026. Potensi bencana Kabupaten Gresik diketahui berdasarkan bencana yang pernah terjadi ataupun bencana yang memiliki kemungkinan terjadi. Informasi catatan bencana yang pernah terjadi didapatkan dari Data Kajian Resiko Bencana Kabupaten Gresik kerjasama BPBD Kabupaten Gresik dengan BNPB.

Berdasarkan data tersebut, jenis bencana pernah terjadi di Kabupaten Gresik adalah banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Untuk mengetahui kembali timbulnya kemungkinan bencana beserta dampak-dampaknya, maka diperlukan kajian risiko yang dilaksanakan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan untuk masing-masing bencana. Hasil analisa pengkajian risiko bencana menunjukkan 9 (sembilan) potensi bencana di Kabupaten Gresik. Potensi-potensi bencana tersebut adalah:

1. Banjir
2. Kegagalan teknologi
3. Kekeringan
4. Cuaca ekstrim
5. Tanah longsor
6. Kebakaran hutan dan lahan
7. Gelombang ekstrim dan abrasi
8. Gempa bumi
9. Epidemii dan wabah penyakit



Potensi bahaya antara lain geologis, social ekonomi, politik, situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, budaya dan teknologi dari suatu kelompok masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan.

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana tahun 2016 – 2020 tingkat bahaya seluruh potensi bahaya bencana di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No.	JENIS BAHAYA BENCANA	BAHAYA	
		Luas (Ha)	Tingkat
1.	Banjir	82.809	Tinggi
2.	Cuaca ekstrim	97.852	Tinggi
3.	Epidemi dan Wabah Penyakit	7.274	Rendah
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3.314	Tinggi
5.	Gempa Bumi	106.526	Rendah
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	19.160	Tinggi
7.	Kekeringan	106.527	Tinggi
8.	Tanah Longsor	551	Sedang
9.	Kegagalan Tekhnologi	6.690	Tinggi

BANJIR

Pengkajian kelas bahaya banjir berdasarkan acuan parameter-parameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameter-parameter tersebut adalah daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan.



Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Gresik seperti tabel berikut:

Potensi Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balongpanggang	2.264	2.758	1.503	6.525
2	Benjeng	1.066	2.707	2.448	6.221
3	Bungah	6.598	1.338	698	8.634
4	Cerme	2.108	2.707	2.448	7.263
5	Driyorejo	3.627	737	1.040	5.404
6	Duduksampeyan	742	5.700	1.707	8.149
7	Dukun	2.650	3.250	737	6.637
8	Gresik	157	414	-	571
9	Kebomas	1.837	870	621	3.328
10	Kedamean	5.019	1.234	311	6.564
11	Manyar	1.534	3.347	4.416	9.297
12	Menganti	3.041	2.181	1.867	7.089
13	Panceng	4.035	1.561	-	5.596
14	Sidayu	1.604	1.450	1.426	4.480
15	Ujung Pangkah	6.674	2.647	2.322	11.643
16	Wringinanom	4.927	879	244	6.050
17	Sangkapura	1.112	492	279	1.883
18	Tambak	105	174	629	908
Total		49.100	34.446	22.696	106.242

Ancaman banjir di Kabupaten Gresik didominasi dengan kategori sedang (34.650ha). Ancaman banjir kategori tinggi (22.392ha) tersebar di enam belas kecamatan yaitu: Kecamatan Manyar memiliki ancaman kategori tinggi paling luas (4416ha), Kecamatan Benjeng (2.448 ha). Penyebab banjir di Kecamatan Manyar dan Benjeng diakibatkan karena luapan Kali Lamong.

KEGAGALAN TEKNOLOGI

Penilaian ancaman kegagalan teknologi didapatkan dari luas industri di Kabupaten Gresik. Industri di Kabupaten Gresik berkembang baik di kawasan industri maupun non-kawasan. Beberapa industri besar seperti pabrik pupuk petrokimia serta pabrik peleburan dan pemurnian tambang (smelter) terbesar di dunia yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia berdiri di Kabupaten Gresik. Selain, itu ada juga industri-industri yang mengelompok membentuk kawasan, seperti KIG (Kawasan Industri Gresik), JIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate), dan Kawasan Industri Maspion. Kegagalan teknologi pada industri pengolahan logam, pembangkit listrik, industri kimia, dll akan mengakibatkan dampak yang cukup besar seperti kerusakan lingkungan dan infrastruktur.



Ancaman Kegagalan Teknologi di Kabupaten Gresik didapatkan dihasilkan tingkat ancaman kegagalan teknologi dan juga merupakan gambaran luasan kecamatan terdampak ancaman kegagalan teknologi di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang memiliki klasifikasi ancaman tinggi yakni Kecamatan Driyorejo, Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti, dan Kecamatan Wringinanom. Keenam kecamatan ini dikatakan tinggi karena memiliki luasan kawasan industri yang luas dengan jumlah pekerja yang sangat banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya kegagalan teknologi di Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balongpanggang	6.539	-	-	6.539
2	Benjeng	-	6.234	-	6.234
3	Bungah	8.634	-	-	8.634
4	Cerme	-	7.168	-	7.168
5	Driyorejo	-	-	5.466	5.466
6	Duduksampeyan	-	8.184	-	8.184
7	Dukun	6.667	-	-	6.667
8	Gresik	-	-	734	734
9	Kebomas	-	-	3.468	3.468
10	Kedamean	-	6.692	-	6.692
11	Manyar	-	-	9.933	9.933
12	Menganti	-	-	7.105	7.105
13	Panceng	-	6.173	-	6.173
14	Sidayu	-	4.483	-	4.483
15	Ujung Pangkah	-	12.459	-	12.459
16	Wringinanom	-	1	6.231	6.232
Total		21.840	51.394	32.937	106.171

KEKERINGAN

Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik terjadi akibat rendahnya intensitas hujan yang berkepanjangan dan struktur tanah di bagian utara Jawa Timur yang memiliki struktur tanah keras dapat memberikan dampak buruk seperti kekurangan sumber air, peningkatan suhu, dan kemarau panjang.



Pengkajian ancaman bencana kekeringan dilakukan dengan mengidentifikasi formasi geologi (batuan) yang dilanjutkan dengan skoring, setelah itu dilakukan pengelasan yang mana kelas dibagi 3 yakni rendah, sedang, dan tinggi sehingga diketahui ancaman kekeringan di Kabupaten Gresik. Klasifikasi rendah meliputi jenis batuan alluvium dan formasi gunung api quarter. Klasifikasi sedang meliputi batu gamping terumbu, formasi madura, formasi mandalika, formasi kasai, formasi pamaluan, formasi sekala, formasi seureula, formasi ulakan, formasi waru koceng, formasi lembak dan formasi kaliwangu.

Sedangkan untuk klasifikasi tinggi ialah formasi lidah, formasi sonde, formasi pucangan, dan formasi kabuh. Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Gresik seperti tabel berikut:

Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balongpanggung	4.236	-	2.303	6.539
2	Benjeng	4.132	-	2.102	6.234
3	Bungah	6.163	2.471	-	8.634
4	Cerme	5.367	-	1.801	7.168
5	Driyorejo	2.136	689	2.642	5.467
6	Duduksampeyan	6.090	-	2.094	8.184
7	Dukun	3.678	2.989	-	6.667
8	Gresik	290	5	439	734
9	Kebomas	960	1.327	1.181	3.468
10	Kedamean	3.413	711	2.567	6.691
11	Manyar	8.510	278	1.145	9.933
12	Menganti	2.320	-	4.785	7.105
13	Panceng	498	5.675	-	6.173
14	Sidayu	2.039	2.444	-	4.483
15	Ujung Pangkah	10.153	2.306	-	12.459
16	Wringinanom	1.027	371	4.833	6.231
17	Sangkapura	12.364	239	-	12.603
18	Tambak	7.226	210	-	7.436
Total		80.602	19.715	25.892	126.209

kecamatan dengan potensi ancaman kekeringan tertinggi adalah di Kecamatan Menganti (4785,12Ha), dan Kecamatan Wringinanom (4832,96Ha). Kecamatan di Kabupaten Gresik yang memiliki ancaman bencana kekeringan dengan klasifikasi tinggi selain dua kecamatan diatas adalah Kecamatan Balongpanggung, Benjeng, Cerme, Driyorejo, Duduk Sampeyan, Gresik, Kebomas, Kedamean dan Kecamatan Manyar. Selain itu, kecamatan-kecamatan lainnya juga memiliki ancaman bencana kekeringan sedang, yaitu Kecamatan Bungah, Driyorejo, Dukun, Gresik, Kebomas, Kedamean, Manyar, Panceng, Sangkapura, Sidayu, Tambak, Ujung Pangkah

CUACA EKSTRIM

Pengkajian indeks bahaya cuaca ekstrim berdasarkan acuan parameter-parameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameter-parameter tersebut adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan



Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas Ancaman (Ha) Rendah	No	Kecamatan	Luas Ancaman (Ha) Rendah
1	Balongpanggang	4.236	10	Kedamean	6.692
2	Benjeng	4.132	11	Manyar	9.933
3	Bungah	6.163	12	Menganti	7.105
4	Cerme	5.367	13	Panceng	6.173
5	Driyorejo	2.136	14	Sidayu	4.483
6	Duduksampeyan	6.090	15	Ujung Pangkah	12.459
7	Dukun	3.678	16	Wringinanom	6.231
8	Gresik	290	17	Sangkapura	12.603
9	Kebomas	960	18	Tambak	7.435

kategori angin kencang terjadi pada kecepatan >28 knot, sehingga kecepatan angin di Kabupaten Gresik tergolong rendah. Data historis kejadian cuaca ekstrim terjadi maksimal 2 kali dalam 4 tahun, maka jika merujuk pada batasan cuaca ekstrem Kabupaten Gresik tergolong rendah. Berdasarkan data tersebut jika di overlay hasil ancaman cuaca ekstrim yang didapatkan ialah rendah).

TANAH LONGSOR

Pengkajian kelas bahaya tanah longsor berdasarkan Perhitungan ancaman tanah longsor pada pemetaan kawasan rawan bencana longsor menggunakan parameter kelerengan dan gerakan tanah. Lereng dikelaskan sesuai kategorinya. Lereng yang masuk dalam kategori kelas >45% mempunyai potensi longsor dan akan diolah bersama peta zona gerakan tanah. Curah hujan tinggi sangat mendukung terjadinya proses pelapukan batuan menjadi tanah pada lereng.

Lereng yang tersusun oleh lapisan tumpukan tanah tebal (sedimen) yang mudah lepas sehingga memicu terjadinya longsor. Apabila tanah di lereng mengalami kebasahan yang semakin menambah berat tanah pada lereng, maka akan dapat terjadi longsor karena terjadi penurunan daya ikat (kohesi) tanah di lereng tersebut. Air yang mengerosi tanah tersebut jika terus mengalir akan dapat menyebabkan banjir lumpur atau berubah menjadi banjir bandang. Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Gresik sebagai berikut:



No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balongpanggang	29	-	-	29
2	Benjeng	33	-	-	33
3	Bungah	28	-	-	28
4	Driyorejo	197	-	-	197
5	Duduksampeyan	43	-	-	43
6	Dukun	15	-	-	15
7	Kebomas	404	178	23	605
8	Kedamean	319	-	-	319
9	Panceng	1.341	61	33	1.435
10	Sidayu	87	-	-	87
11	Ujung Pangkah	470	58	189	717
12	Wringinanom	856	-	34	890
13	Sangkapura	523	1.664	9.459	11.646
14	Tambak	364	733	5.799	6.896
Total		4.709	2.694	15.537	22.940

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pengkajian kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Kabupaten Gresik hampir tidak memiliki kawasan hutan atau prosentase kawasan hutannya dibawah 1%, sehingga pengawasan dan kewenangan wilayah hutan di Kabupaten Gresik berada di bawah kewenangan KPH/Perhutani Tuban. Pengkajian ancaman kebakaran hutan dan lahan ditentukan oleh jenis tanah, jenis tutupan lahan, dan curah hujan. Diketahui jika tutupan lahan berupa hutan lahan rendah dan hutan lahan tinggi, maka digolongkan sebagai kebakaran hutan sementara tutupan lahan lainnya digolongkan sebagai kebakaran lahan Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik.



Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balongpanggang	-	108	-	108
2	Benjeng	-	89	-	89
3	Bungah	445	649	-	1.094
4	Cerme	-	118	7	125
5	Driyorejo	-	161	97	258
6	Duduksampeyan	-	22	-	22
7	Dukun	65	1.198	-	1.263
8	Gresik	-	22	2	24
9	Kebomas	178	86	258	522
10	Kedamean	300	12	-	312
11	Manyar	42	177	72	291
12	Menganti	94	125	-	219
13	Panceng	1.006	2.848	-	3.854
14	Sidayu	47	490	-	537
15	Ujung Pangkah	1.622	2.058	-	3.680
16	Wringinanom	202	111	-	313
17	Sangkapura	6.647	2.613	-	9.260
18	Tambak	2.408	2.711	-	5.119
Total		13.056	13.598	436	27.090

Berdasarkan , dapat diketahui bahwa tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gresik didominasi kelas sedang (13.598 ha). Ancaman tingginya (437 ha). Kawasan dengan tingkat ancaman tinggi antara lain: Kecamatan Cerme, Driyorejo, Gresik, Kebomas, dan Kecamatan Manyar. Kecamatan Kebomas memiliki wilayah dengan tingkat ancaman tinggi yang luas yakni sebesar 258 ha.

GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Pengkajian kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan acuan parameter-parameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameter-parameter tersebut adalah tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai.



Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Bungah	314	5	-	319
2	Gresik	138	16	-	154
3	Kebomas	59	17	-	76
4	Manyar	435	56	-	491
5	Panceng	137	-	-	137
6	Ujung Pangkah	825	26	-	851
7	Sangkapura	834	164	-	998
8	Tambak	300	214	178	692
Total		3.042	498	178	3.718

tingkat ancaman bencana gelombang tinggi dan abrasi hanya terdapat di Kecamatan Tambak di Pulau Bawean. Kecamatan Bungah, Gresik, Kebomas, Manyar, Panceng, Sangkapura, Tambak dan Ujungpangkah masuk dalam dua kelas yakni rendah dan sedang. Total luas wilayah yang memiliki tingkat ancaman rendah adalah 3.061 ha, tingkat ancaman sedang 497,4 ha dan tingkat ancaman tinggi adalah 178 ha

GEMPA BUMI

Bahwa Kabupaten Gresik dilewati oleh 2 patahan yang masih aktif, yaitu Sesar Waru dan Sesar Surabaya. Sesar Waru termasuk sesar aktif dan mengalami pergerakan setiap tahunnya rata-rata sejauh 0,5 mm/tahun, sedangkan Sesar Surabaya mengalami pergerakan setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,1 mm/tahun. Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya gempabumi di Kabupaten Gresik



No	Kecamatan	Luas Ancaman (Ha) Rendah
1	Balongpanggung	6.539
2	Benjeng	6.234
3	Bungah	8.634
4	Cerme	7.168
5	Driyorejo	5.466
6	Duduksampeyan	8.186
7	Dukun	6.667
8	Gresik	734
9	Kebomas	3.468

No	Kecamatan	Luas Ancaman (Ha) Rendah
10	Kedamean	6.692
11	Manyar	9.933
12	Menganti	7.105
13	Panceng	6.173
14	Sidayu	4.483
15	Ujung Pangkah	12.459
16	Wringinanom	6.231
17	Sangkapura	12.603
18	Tambak	7.435

bahaya gempa bumi di Kabupaten Gresik memiliki dua probabilitas. Kemungkinan pertama ialah gempa bumi dengan probabilitas 10% yang terjadi setiap 50 tahun, yang kedua ialah dengan probabilitas 1% yang terjadi setiap 100 tahun). Potensi bahaya (Gambar 5.15) menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik secara keseluruhan memiliki potensi bencana gempa bumi rendah.

EPIDEMI WABAH PENYAKIT

Pengkajian kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit berdasarkan acuan parameter-parameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameter-parameter tersebut adalah kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penderita malaria, kepadatan penderita demam berdarah, kepadatan penderita HIV AIDS, dan kepadatan penduduk. Selain itu di tahun 2022 juga dihadapkan dengan masalah masalah penyakit lainnya anatra lain COVID 19, serta virus PMK (penyakit mulut dan kuku), cacar monyet. Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Gresik, diperoleh potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Gresik sebagai berikut:



No	Kecamatan	Luas (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balongpanggang	-	962	5.575	6.537
2	Benjeng	-	545	5.685	6.230
3	Bungah	-	5.321	3.301	8.622
4	Cerme	-	2.254	4.899	7.153
5	Driyorejo	-	4.946	509	5.455
6	Duduksampeyan	8.174	-	-	8.174
7	Dukun	2.771	3.881	-	6.652
8	Gresik	-	-	734	734
9	Kebomas	-	1	3.465	3.466
10	Kedamean	6.684	6	-	6.690
11	Manyar	-	3	9.918	9.921
12	Menganti	-	689	6.414	7.103
13	Panceng	6.173	-	-	6.173
14	Sidayu	1.969	2.514	-	4.483
15	Ujung Pangkah	-	9.573	2.887	12.460
16	Wringinanom	1.517	4.703	-	6.220
17	Sangkapura	12.603	-	-	12.603
18	Tambak	7.435	-	-	7.435
Total		47.326	35.398	43.387	126.111

tingkat ancaman epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Gresik didominasi kategori rendah. Tingkat ancaman epidemi dan wabah penyakit kategori rendah ini sebesar 47.326 ha. Sementara tingkat ancaman tinggi sebesar 43.387 ha. Terdapat sembilan kecamatan yang masuk dalam kategori tinggi.

Beberapa penyebab tingginya ancaman di kecamatan-kecamatan tersebut salah satu contohnya seperti di Kecamatan Gresik karena jumlah kasus TBC paling tinggi yakni 243 kasus, sedangkan Kecamatan Manyar disebabkan tingginya kasus positif Covid-19. Tingginya masyarakat terpapar Covid-19 diakibatkan oleh tingginya aktifitas dan mobilitas manusia di Kecamatan Manyar yang merupakan salah satu Kawasan industry terluas di Kabupaten Gresik.



BPBD GRESIK



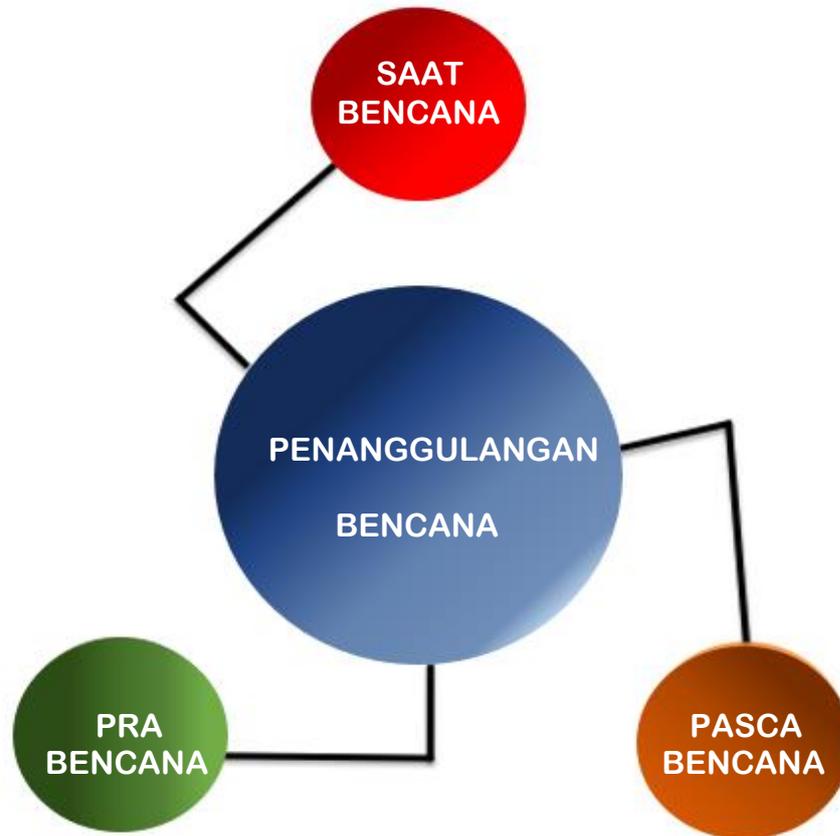
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam kerangka penanganan bencana sejak dini, paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

Bahwasanya kerawanan bencana akan semakin berkurang bahayanya jika ada upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan peningkatan kapasitas masyarakat maupun penurunan tingkat kerentanan. Dalam kerangka penanganan bencana sejak dini, paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) factor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Mengurangi ancaman/bahaya Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.
2. Mengurangi kerentanan Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upayaupaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.
3. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Hak Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Bahwa setiap orang berhak :

- a. Mendapat perlindungan social dan rasa aman dari bencana
- b. Mendapat pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana
- c. Mendapat informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana
- d. Berperan dalam perencanaan, pengoprasian program penanggulangan bencana
- e. Brrpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya
- f. Melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas penanggulangan bencana

Tahap Prabencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam pada tahapan prabencana meliputi:

- a. Situasi tidak terjadi bencana
- b. Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana
- b. Pengurangan risiko bencana
- c. Pencegahan
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
- e. Persyaratan analisis risiko bencana
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- g. Pendidikan dan pelatihan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan Dini
- c. Mitigasi Bencana

Tahap Tanggap Darurat Bencana

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menagani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
- Penentuan status keadaan darurat bencana
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan terhadap kelompok rentan
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital



Tanggap Darurat

Saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/ lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/ lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Saat terjadi bencana, Kepala BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Kepala BPBD dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan



Tahap

Pascabencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- b. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan wilayah bencana
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- d. Pemulihan sosial psikologis
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik

Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalah rumah/ lingkungan dalam kategori:

- a. Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi)
- b. Pemukiman kembali (resettlement dan relokasi)
- c. Transmigrasi keluar daerah bencana

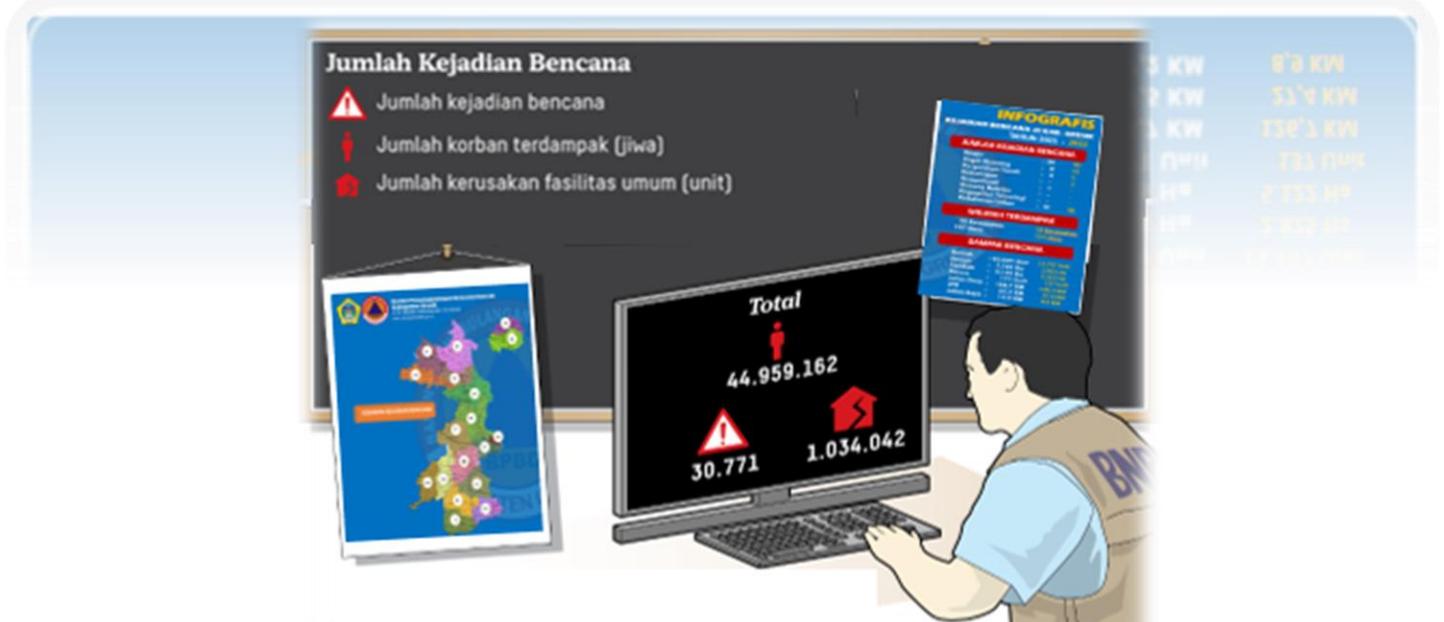
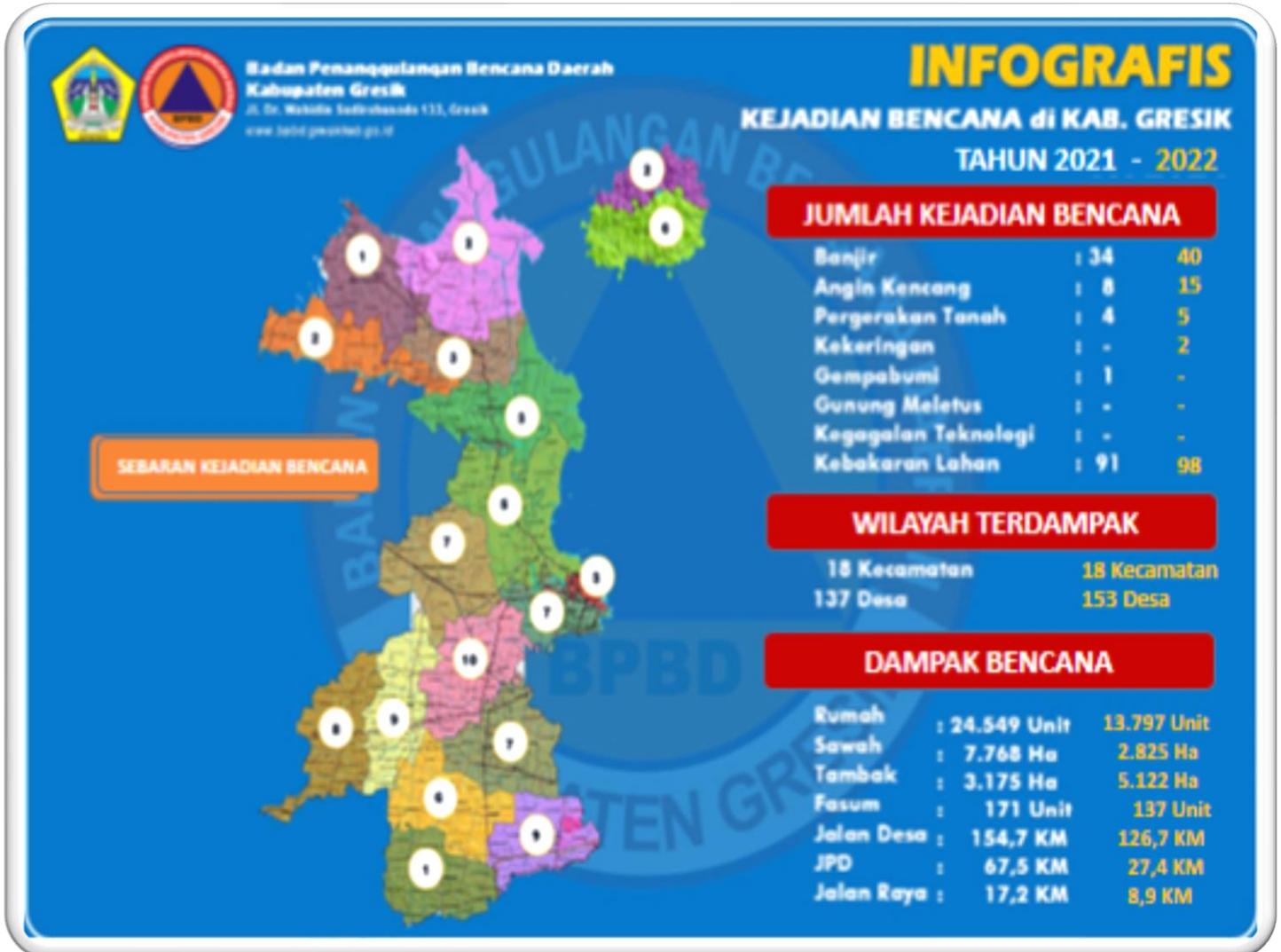
Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

4 Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan bencana

1. Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat
2. Kelestarian lingkungan hidup
3. Kemanfaatan dan efektivitas
4. Lingkup luas wilayah

DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 - 2022



CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan pra bencana	100%	100%	100%	Report Base Data Penanganan Pra Bencana
2	Menurunnya risiko bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	56,82% (100 Desa dari 176 Desa)	59,09 % (104 Desa dari 176 Desa)	104 %	Report Base Data Desa Tangguh Bencana
3	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	100%	100%	100%	Report Base Data Penanganan Saat Bencana
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	100%	Report Base Data Pasca Bencana





Contact Us



BPBD GRESIK

Jl. Dr. Wahidin SH. No. 133 - Gresik

Telp. : (031) 395151

Fax. : (031) 395151

Email : bpbdkabgresik@gmail.com

Website : bpbd.gresikkab.go.id